

PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR DI KABUPATEN KLATEN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh:

DEANDRA TABITHA MUTIARA

E1A016229

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan terjadi perubahan kewenangan pemberian izin usaha, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan, pengawasan dan penerimaan pajak serta retribusi daerah. Terutama pengawasan yang semula berada ditangan pemerintah daerah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Klaten dan mengetahui hambatan yang dialami dalam pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, metode penyajian data dengan penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama pengawasan pertambangan pasir di Kabupaten Klaten mengalami perubahan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang semula pengawasan berada ditangan pemerintah kabupaten/kota kini berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Namun, Pemerintah daerah kabupaten Klaten tetap dapat melakukan pengawasan, kemudian jika terdapat suatu pelanggaran maka Pemerintah Daerah kabupaten Klaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat dapat menyampaikan laporan – laporan mengenai pelanggaran pertambangan pasir melalui Pemerintah Kabupaten Klaten untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk ditindak lebih lanjut. Kedua faktor penghambat pengawasan pertambangan pasir di kabupaten Klaten dibagi menjadi dua yaitu faktor internal atau dari pemerintah dan faktor eksternal atau dari luar pemerintah.

Kata kunci: Pengawasan, Pertambangan Pasir, dan Kabupaten Klaten.

***CONTROLLING OF SAND MINING IN KLATEN REGENCY AFTER
PUBLICATION OF REGULATION 2014 NUMBER 23 CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT***

By:
DEANDRA TABITHA MUTIARA
E1A016229

ABSTRACT

This research is based on the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which causes change in the authority for grant business licenses , grant business licenses area, fostering, controlling, local taxes revenue, and levies. Especially, the controlling that was previously under the authority of central government. This research aims to know how does the controlling of sand mining in Klaten Regency and to know the obstacles experienced under the supervision. The type of this research is normative juridical with a statutory approach. The data analysis use primary data and secondary data. Method of collecting data was document study or literature (library) study. The method of presenting data was analytical descriptive and the method of analysis data was qualitative descriptive.

Based on the result and finding of this research concluded that firstly, the controlling of sand mining in Klaten Regency was changed after the enactment of Law number 23 of 2014 concerning Regional Government , which previously under authority of regional government, now turns into the authority of central government. However, the government of Klaten Regency can still carry out the controlling. Furthermore, if there is a violation, Klaten Regency government can coordinate with the Government of Central Java Province, and the society can submit report of sand mining violations through the Government of Central Java Province of the further actions. Two obstacles factors of controlling of sand mining in Klaten Regency was divided into two, internal factor or from within the government and external factor or from outside the government.

Keywords: *Controlling, Sand Mining, Klaten Regency.*